



Peran PPKn Dalam Meningkatkan Kesadaran Demokrasi Pada Siswa SMKN 2 Kota Kediri

Ahmad Misbahul Ulum¹, Agus Widodo², Ety Andyastuti³

Universitas Nusantara PGRI Kediri¹²³

ahmadmisbahululum5@gmail.com, aguswidodo@unpkediri.ac.id,
ettyandyastutu@unpkediri.ac.id

ABSTRACT

This study aims to describe the role of the Pancasila and Civic Education (PPKn) subject in enhancing students' democratic awareness. This research employs a qualitative descriptive approach using in-depth interviews, observation, and document analysis. The research subjects consisted of two PPKn teachers and ten 10th-grade students from SMKN 2 Kota Kediri, selected through purposive sampling. The findings indicate that PPKn plays a crucial role in shaping students' understanding of democratic principles, such as active participation, freedom of expression, and tolerance toward differences. PPKn teachers act as facilitators and role models in creating democratic discussion spaces and encouraging student involvement in deliberation activities and school organizations. However, the study also reveals several challenges in the implementation of PPKn, including passive student attitudes, limited instructional time, and a tendency among students to perceive the subject matter as overly theoretical. This study recommends the use of more contextual, participatory, and real-life-relevant teaching methods to optimize the role of PPKn in fostering democratic awareness within the school environment.

Keywords: Civic Education, democratic awareness, contextual participatory learning

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam meningkatkan kesadaran demokrasi siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari dua guru PPKn dan sepuluh siswa kelas X SMKN 2 Kota Kediri. Subjek dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn berperan penting dalam membentuk pemahaman siswa mengenai prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi aktif, kebebasan berpendapat, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Guru PPKn berperan sebagai fasilitator dan teladan dalam menciptakan ruang diskusi yang demokratis dan mendorong keterlibatan siswa dalam kegiatan musyawarah dan organisasi sekolah. Temuan yang lain tentang pelaksanaan pembelajaran masih menghadapi beberapa hambatan, seperti sikap pasif sebagian siswa, keterbatasan waktu pembelajaran, dan kecenderungan siswa menganggap materi bersifat teoritis. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan metode pembelajaran yang lebih kontekstual, partisipatif, dan relevan dengan kehidupan nyata siswa untuk mengoptimalkan peran PPKn dalam meningkatkan kesadaran demokrasi di lingkungan sekolah.

Kata kunci: PPKn, kesadaran demokrasi, pembelajaran kontekstual partisipatif

PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk kesadaran demokrasi di kalangan peserta didik, termasuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). PPKn tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan tentang sistem demokrasi, tetapi juga sebagai wahana internalisasi nilai-nilai dasar kewarganegaraan yang mencakup tanggung jawab, partisipasi aktif, serta integritas sebagai warga negara (Nurhidayah, 2021; Hartini, 2023). Pembelajaran PPKn yang efektif mampu menghasilkan disposisi kewarganegaraan yang utuh yakni pengetahuan, sikap, dan keterampilan demokratis yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perhatian terhadap pendidikan demokrasi dalam konteks pembelajaran PPKn telah banyak dibahas dalam kajian akademik. Zamroni (dalam Srikanto & Fauzi, 2013) menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menumbuhkan sikap kritis dan tindakan demokratis melalui kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dan partisipatif. Hal ini didukung oleh Rustandi dan Suryadi (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran demokrasi merupakan fondasi utama bagi terbangunnya masyarakat politik yang inklusif, di mana seluruh warga negara memiliki hak untuk diwakili dan dihargai secara setara. Dengan demikian, pembelajaran PPKn idealnya tidak bersifat doktriner, tetapi menjadi ruang pengembangan pemikiran kritis, dialog terbuka, dan praktik demokrasi yang kontekstual.

Realitas pelaksanaan pembelajaran PPKn di sejumlah satuan pendidikan menunjukkan bahwa kesadaran demokrasi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam diri siswa. Prabowo (2021) dan Ramdani (2021) menemukan bahwa masih banyak siswa yang kurang memahami nilai-nilai demokrasi secara substantif dan belum menunjukkan keterlibatan aktif dalam aktivitas pembelajaran yang mendorong praktik demokrasi. Faktor-faktor seperti keterbatasan metode pembelajaran, dominasi ceramah, minimnya ruang diskusi, serta kurangnya integrasi nilai demokrasi dalam kehidupan sekolah menjadi kendala dalam proses internalisasi nilai kewarganegaraan.

Dalam konteks tersebut, guru PPKn memiliki peran sentral dalam menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis dan partisipatif. Berbagai pendekatan seperti diskusi kelompok, simulasi musyawarah, studi kasus, hingga proyek kolaboratif terbukti dapat meningkatkan pemahaman dan

keterlibatan siswa dalam praktik-praktik demokrasi di kelas (Lider, 2019; Japar, 2019). Di samping itu, implementasi kurikulum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat dan kebutuhan peserta didik menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pendidikan demokrasi.

Penelitian ini dilakukan di SMKN 2 Kota Kediri sebagai respons terhadap kondisi pembelajaran PPKn yang masih cenderung berpusat pada guru dan kurang mengakomodasi keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan belajar. Berdasarkan pengamatan awal, tampak bahwa nilai-nilai demokrasi belum secara optimal mewarnai budaya belajar di lingkungan sekolah, khususnya dalam hal partisipasi siswa dalam diskusi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan bersama. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana praktik pembelajaran PPKn di sekolah ini mampu membentuk kesadaran demokrasi siswa, serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat proses tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam meningkatkan kesadaran demokrasi pada siswa SMKN 2 Kota Kediri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi strategi pembelajaran yang diterapkan guru dalam menyampaikan nilai-nilai demokrasi serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu pendidikan kewarganegaraan, serta memberikan masukan praktis bagi peningkatan kualitas pembelajaran PPKn yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai demokrasi dalam konteks pendidikan menengah kejuruan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif fenomenologis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, dalam hal ini terkait dengan peran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam membentuk kesadaran demokrasi di kalangan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Desain deskriptif fenomenologis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pengalaman, persepsi, dan pemaknaan siswa serta guru terhadap pembelajaran PPKn yang berorientasi pada nilai-nilai demokrasi (Moleong, 2017; Sugiyono, 2019).



Penelitian ini dilaksanakan di SMKN 2 Kota Kediri, yang berlokasi di Jalan Veteran No. 4, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama periode April hingga Juni 2025. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive sampling bebas dengan pertimbangan bahwa sekolah ini dinilai aktif dalam menerapkan pembelajaran PPKn secara kontekstual dan memiliki keragaman latar belakang siswa yang dianggap dapat memperkaya data penelitian. Selain itu, dukungan lingkungan sekolah serta keterlibatan aktif guru dalam proses pembelajaran turut menjadi dasar dalam pemilihan lokasi penelitian.

Subjek penelitian ini terdiri atas 10 siswa kelas X yang terdiri dari lima siswa laki-laki dan lima siswa perempuan, serta 2 guru mata pelajaran PPKn yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Penentuan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap paling memahami dan memiliki pengalaman yang relevan terkait pembelajaran PPKn dan penerapan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada guru dan siswa guna memperoleh pandangan, pengalaman, serta pemahaman mereka terhadap materi dan proses pembelajaran PPKn yang berkaitan dengan kesadaran demokrasi. Observasi dilakukan di dalam kelas untuk mencermati interaksi antara guru dan siswa, metode pembelajaran yang digunakan, serta respon siswa terhadap materi demokrasi. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk menelaah dokumen seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus, dan hasil tugas siswa sebagai pelengkap data dan bentuk triangulasi.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Analisis dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian, baik saat pengumpulan data maupun setelahnya, guna menemukan pola, tema, dan makna yang mendalam dari temuan lapangan. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperkuat validitas dan reliabilitas data.

Dalam pelaksanaan penelitian, aspek etika penelitian dijaga dengan memastikan bahwa semua partisipan memberikan persetujuan melalui *informed consent* sebelum terlibat dalam penelitian. Identitas informan dijaga

kerahasiaannya dengan menggunakan kode atau inisial untuk menjamin anonimitas. Selain itu, peneliti berkomitmen untuk menjaga objektivitas, transparansi, serta tanggung jawab ilmiah dalam setiap tahapan proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam meningkatkan kesadaran demokrasi pada siswa SMKN 2 Kota Kediri. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 10 siswa kelas X dan 2 guru PPKn, serta observasi dan dokumentasi selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelajaran PPKn memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan kesadaran demokrasi siswa. Para siswa mengaku memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip demokrasi melalui pembelajaran yang bersifat aktif, seperti diskusi kelompok, debat, dan studi kasus. Aktivitas ini mendorong siswa untuk lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan pandangan, dan memahami pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama.

Dalam proses pembelajaran, guru menerapkan metode yang partisipatif dan kontekstual. Model pembelajaran seperti *problem-based learning* dan studi kasus yang dikaitkan dengan peristiwa aktual seperti pemilu, demonstrasi damai, atau konflik sosial membuat materi menjadi lebih relevan dengan kehidupan siswa. Siswa menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap materi yang berkaitan langsung dengan pengalaman mereka di sekolah, seperti pemilihan pengurus OSIS, musyawarah kelas, dan simulasi pemilu yang dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Beberapa hambatan tetap ditemukan dalam pelaksanaan pembelajaran. Beberapa siswa menunjukkan dominasi dalam diskusi, sementara yang lain cenderung pasif. Selain itu, waktu yang terbatas untuk pembelajaran PPKn menjadi kendala dalam mendalami materi secara menyeluruh. Guru juga menghadapi keterbatasan dalam menggunakan sumber belajar yang variatif dan kontekstual.

Kegiatan organisasi di sekolah turut memperkuat pengalaman demokratis siswa. Melalui kegiatan OSIS, simulasi pemilu, dan musyawarah kelas, siswa mendapatkan pengalaman langsung dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, tanggung jawab, kerja sama, dan kepemimpinan. Guru menyatakan bahwa keikutsertaan siswa dalam kegiatan

ini berkontribusi terhadap penguatan pemahaman mereka terhadap konsep-konsep demokrasi secara nyata.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini mendukung teori pendidikan demokrasi yang menekankan pentingnya pendekatan pembelajaran partisipatif dan kontekstual. Sejalan dengan pandangan Zamroni (dalam Srikanto & Fauzi, 2013), pembelajaran PPKn diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran warga negara mengenai hak dan kewajibannya melalui aktivitas yang melibatkan keterlibatan siswa secara aktif. Fakta bahwa siswa merasa lebih percaya diri, terbuka terhadap perbedaan, serta mampu berpartisipasi dalam diskusi kelas mencerminkan bahwa proses pembelajaran telah mendorong tumbuhnya sikap demokratis. Konsep kesadaran demokrasi menurut Sapriya (2017) yang mencakup integrasi antara pengetahuan, sikap, dan tindakan kewarganegaraan terlihat jelas dalam temuan penelitian ini. Siswa tidak hanya memahami konsep demokrasi secara teoritis, tetapi juga mempraktikkannya melalui kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah. Pembelajaran berbasis diskusi, debat, dan studi kasus memungkinkan siswa untuk mengembangkan aspek kognitif (pemahaman demokrasi), afektif (menghargai perbedaan), dan psikomotorik (tindakan partisipatif).

Keterkaitan antara temuan lapangan dan penelitian terdahulu juga terlihat. Rahayu (2023) dan Abbas & Djurmudi (2020) menekankan bahwa metode pembelajaran aktif dalam PPKn terbukti meningkatkan sikap demokratis siswa. Guru-guru di SMKN 2 Kota Kediri telah mengimplementasikan strategi tersebut melalui integrasi materi PPKn dengan fenomena sosial yang kontekstual serta mengaitkannya dengan kehidupan siswa di lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan. Terdapat sejumlah kendala yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Dominasi siswa tertentu dalam diskusi, kurangnya keberanian sebagian siswa untuk berpendapat, serta keterbatasan waktu pembelajaran menjadi tantangan yang harus diatasi. Dalam konteks ini, penting bagi guru untuk menerapkan strategi diferensiasi, menciptakan ruang aman bagi semua siswa, dan mengelola waktu pembelajaran secara efektif. Selain itu, dukungan sekolah dalam bentuk pelatihan guru, penyediaan sumber belajar yang kontekstual, serta kolaborasi lintas mata pelajaran menjadi elemen penting dalam menciptakan iklim demokratis yang menyeluruh.

Dengan demikian, pembelajaran PPKn yang dirancang secara aktif, relevan, dan kolaboratif terbukti mampu meningkatkan kesadaran demokrasi

siswa. Pengalaman belajar yang bermakna di kelas dan kegiatan sekolah memperkuat pembentukan karakter demokratis yang berorientasi pada nilai-nilai toleransi, tanggung jawab, dan partisipasi. Penelitian ini memberikan dasar kuat untuk mengembangkan model pembelajaran PPKn yang lebih adaptif terhadap konteks sosial siswa dan tuntutan pendidikan kewarganegaraan abad ke-21.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMKN 2 Kota Kediri, dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran demokrasi pada siswa. Pembelajaran PPKn bukan hanya berfungsi sebagai media penyampaian pengetahuan tentang prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai-nilai demokrasi ke dalam sikap dan perilaku siswa. Hal ini tercermin dari adanya peningkatan kemampuan siswa dalam mengekspresikan pendapat secara santun, memahami pentingnya musyawarah dan toleransi, serta menunjukkan keterlibatan aktif dalam kehidupan sekolah yang demokratis. Guru PPKn memainkan peran sebagai fasilitator nilai demokrasi, baik melalui pemilihan metode pembelajaran yang partisipatif seperti diskusi dan studi kasus, maupun melalui keteladanan sikap. Siswa menunjukkan respons positif terhadap pendekatan ini, terutama ketika pembelajaran dikaitkan langsung dengan konteks kehidupan mereka seperti kegiatan OSIS, musyawarah kelas, dan simulasi pemilu. Kesadaran demokrasi juga tampak melalui perilaku siswa yang semakin menghargai perbedaan, menunjukkan tanggung jawab, serta aktif dalam pengambilan keputusan bersama.

Efektivitas pembelajaran PPKn dalam membentuk kesadaran demokrasi didukung oleh beberapa faktor, antara lain kompetensi guru, keberpihakan kurikulum terhadap nilai-nilai demokrasi, pendekatan pembelajaran yang kontekstual, serta iklim sekolah yang terbuka dan inklusif. Di sisi lain, sejumlah kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan waktu pembelajaran, masih dominannya metode ceramah di beberapa kelas, serta belum meratanya kesadaran siswa terhadap pentingnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

SARAN

1. Untuk Guru PPKn: Diharapkan terus mengembangkan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan berbasis konteks kehidupan nyata

siswa. Guru dapat mengintegrasikan isu-isu aktual dan kegiatan simulatif agar siswa tidak hanya memahami demokrasi secara teoritis, tetapi juga dapat mempraktikkannya secara konkret dalam kehidupan sehari-hari.

2. Untuk Sekolah: Disarankan agar sekolah menyediakan lebih banyak ruang partisipasi bagi siswa dalam pengambilan keputusan, baik melalui organisasi intra-sekolah maupun forum musyawarah kelas. Selain itu, dukungan berupa pengembangan profesionalisme guru dan kolaborasi antar mata pelajaran sangat penting untuk menciptakan budaya sekolah yang demokratis dan inklusif.
3. Untuk Peneliti Selanjutnya: Diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian ini melalui pendekatan kuantitatif atau studi perbandingan antar sekolah guna memperkaya perspektif tentang pendidikan demokrasi. Penelitian mendatang juga dapat mengeksplorasi peran media digital, lingkungan sosial, dan pengaruh budaya sekolah dalam membentuk karakter siswa yang demokratis, terutama di konteks Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).



DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, E. W., & Djurmudi, A. (2020). *Pengaruh model pembelajaran aktif terhadap sikap demokratis siswa dalam pembelajaran PPKn*. Jurnal Ilmiah Civic Education, 5(2), 112–123. <https://doi.org/10.21009/jice.v5i2.2020>
- Hartini. (2023). *Pendidikan Kewarganegaraan di Era Demokrasi*. Surabaya: Pena Nusantara.
- Japar, M. (2019). *Model Pembelajaran Kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 24(3), 215–228.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Kurikulum Merdeka pada Jenjang SMK: Pedoman Implementasi. Diakses dari <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/smk>
- Lider, T. (2019). *Peningkatan Kesadaran Demokrasi Siswa Melalui Simulasi Musyawarah*. Jurnal Pendidikan Karakter, 10(1), 66–79.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (2nd ed.). In T. A. Ryan (Ed.), Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Terj. A. Mulyono). Bandung: Remaja Rosdakarya. (Asli: Qualitative Research Methodology, Lexy J. Moleong)
- Nurhidayah. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMK/MAK*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prabowo, A. (2021). *Peran Guru PPKn dalam Meningkatkan Kesadaran Demokrasi Siswa di SMK Negeri 1 Bantul*. Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahayu, D. (2023). *Pengaruh Diskusi Kelas terhadap Sikap Demokrasi Peserta Didik SMK*. Jurnal Wacana Pendidikan, 7(2), 134–143.
- Ramdani, D. (2021). *Analisis Penerapan Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran PPKn di Sekolah Menengah Kejuruan*. Tesis tidak diterbitkan, Universitas Pendidikan Indonesia.

- Rustandi, D., & Suryadi, A. (2022). *Internalisasi Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran PPKn di Sekolah*. Civic Education Journal, 4(1), 45–58. <https://doi.org/10.31294/ce.v4i1.2022>
- Sapriya. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Srikanto, D., & Fauzi, A. (2013). *Pendidikan Demokrasi dalam Pembelajaran PPKn di Sekolah Menengah*. Dalam Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan (hlm. 102–110). Malang: Universitas Negeri Malang.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- UNESCO. (2020). *Education for Democratic Citizenship in a Changing World*. Diakses dari <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374321>